

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun untuk Tahun 2021 - 2026 menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Sektor Pariwisata menjadi salah satu tumpuan memajukan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yang diproyeksikan sebagai transformasi ekonomi hijau dalam upaya menggantikan ketergantungan PDRB terhadap Migas dan Batubara.

Keberhasilan pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat terwujud perlu dukungan/partisipasi dan strategi lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) kepariwisataan dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah, Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata, swasta (investor), para pelaku usaha jasa pariwisata, para perhimpunan wisata, para komunitas wisata, lembaga pendidikan pariwisata, dan peran serta media.

Untuk itu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata sebagai strategi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pembangunan Kepariwisata yang mampu memperkuat perekonomian daerah kedepannya.

Kutai Kartanegara, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara,

THAUHID AFRILIAN NOOR,SP.,M.Si
Pembina/IV(a)
NIP.197604172000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
2.2.3. Sumber Anggaran	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	19
2.4. Review Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	24
2.5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	26
2.5.1. Peluang	26
2.5.2. Tantangan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	40
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020 – 2024	40

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	57
4.1.1. Tujuan	57
4.1.2. Sasaran	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1. Strategi	70
5.2. Arah Kebijakan	70
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	73
6.1. Program	73
6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan	74
6.3. Indikator Kinerja	79
6.4. Kelompok Sasaran	83
6.5. Pendanaan Indikatif	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	91
BAB VIII PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

❖ Tabel 2.1 Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
❖ Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
❖ Tabel 2.3 Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Pangkat dan Golongan	15
❖ Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara (Keadaan per 31 Desember 2019)	17
❖ Tabel 2.5 (TC.24.I.) Perkembangan Dana APBD (Murni) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021	18
❖ Tabel 2.6 (TC.24.II.) Perkembangan Dana APBN (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021	19
❖ Tabel 2.7 Review Target , Realisasi dan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018 (sebelum Review Renstra)	22
❖ Tabel 2.8 Review Target ,Realisasi dan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020 (Setelah Reviu Renstra)	23
❖ Tabel 2.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Pariwisata dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Periode 2016-2020.....	25
❖ Tabel 3.1 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	37
❖ Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.....	47
❖ Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Telaahan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara	54
❖ Tabel 4.1 Keterkaitan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara	57
❖ Tabel 4.2 Daftar 10 Destinasi Wisata Populer Kabupaten Kutai Kartanegara	59

❖ Tabel 4.3 Daftar 10 Kuliner Populer Kabupaten Kutai Kartanegara	59
❖ Tabel 4.4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara	61
❖ Tabel 4.5 (T-C.25) Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	65
❖ Tabel 5.1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	67
❖ Tabel 5.2 (T-C.26) Visi , Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	71
❖ Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026	74
❖ Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026	80
❖ Tabel 6.3 Rencana Pendanaan Indikatif Program APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026	85
❖ Tabel 6.4 (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026	86
❖ Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021– 2026	95
❖ Tabel 7.2 (T-C.28) Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026	98

DAFTAR GRAFIK

❖ Grafik 2.1	
Persentase Pegawai Laki-laki dan Perempuan	12
❖ Grafik 2.2	
Komposisi Pegawai Laki-laki dan Perempuan per-bidang	13
❖ Grafik 2.3	
Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
❖ Grafik 2.4	
Distribusi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang	16

DAFTAR GAMBAR

❖ Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	11
❖ Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Struktur Ruang Wilayah)	52
❖ Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Pola Ruang Wilayah)	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021 - 2025.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategis, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022– 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pedoman dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder periode 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensinergikan bersama seluruh stakeholder terhadap rencana pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian utama, yakni meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah dan/atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya akan dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

Merupakan penjelasan penyelarasan antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

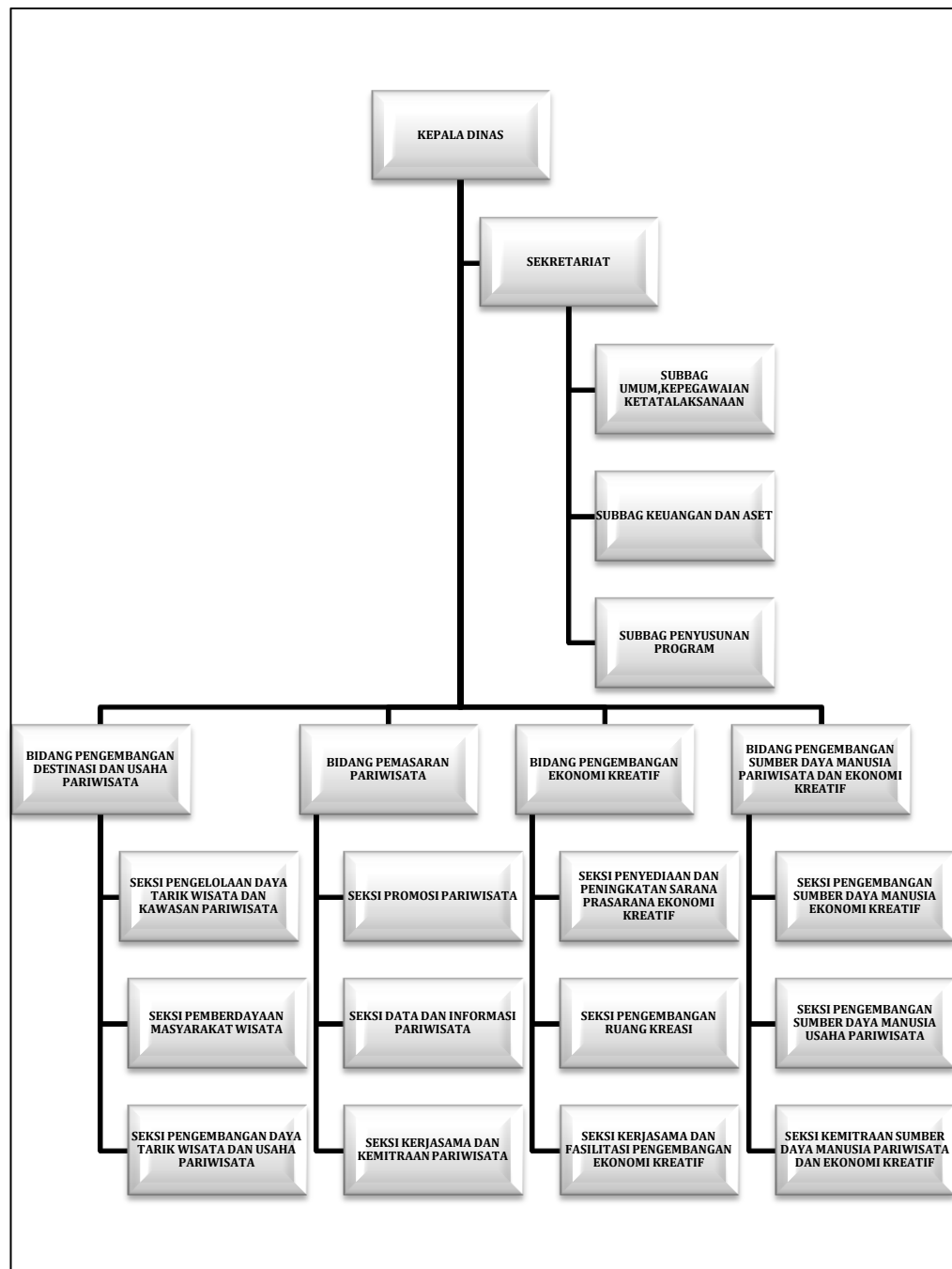
1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pariwisata; dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata.
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Penyediaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Pengembangan Ruang Kreasi; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Kemitraan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

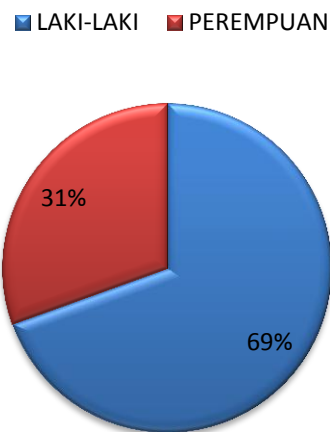
Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata pada tahun 2020 adalah sebanyak 141 orang yang dapat diklasifikasi atas beberapa kriteria sebagai berikut :

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

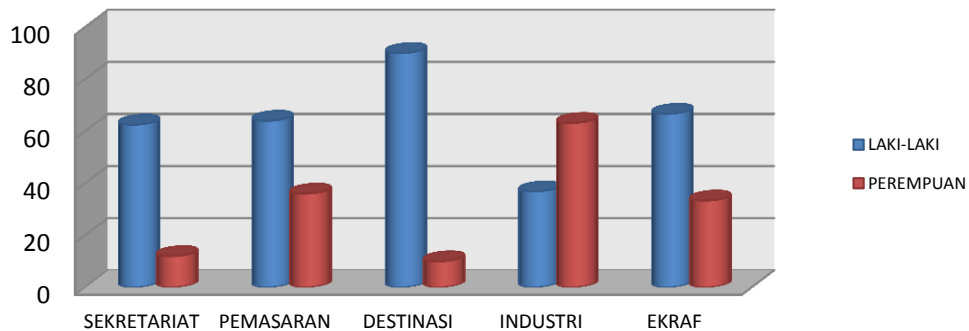
Tabel 2.1. Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Urusan	Jenis Kelamin		Jumlah	%	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1.	Sekretariat	20	12	32	62,50	37,50
2.	Pemasaran Pariwisata	16	9	25	64,00	36,00
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	45	5	50	90,00	10,00
4.	Pembinaan Industri Pariwisata	7	12	19	36,84	63,16
5.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	10	5	15	66,67	33,33
TOTAL		98	43	141	69,50	30,50

Grafik 2.1. Persentase Pegawai Laki-laki dan Perempuan



Grafik 2.2. Komposisi Pegawai Laki-laki dan Perempuan Per-Bidang



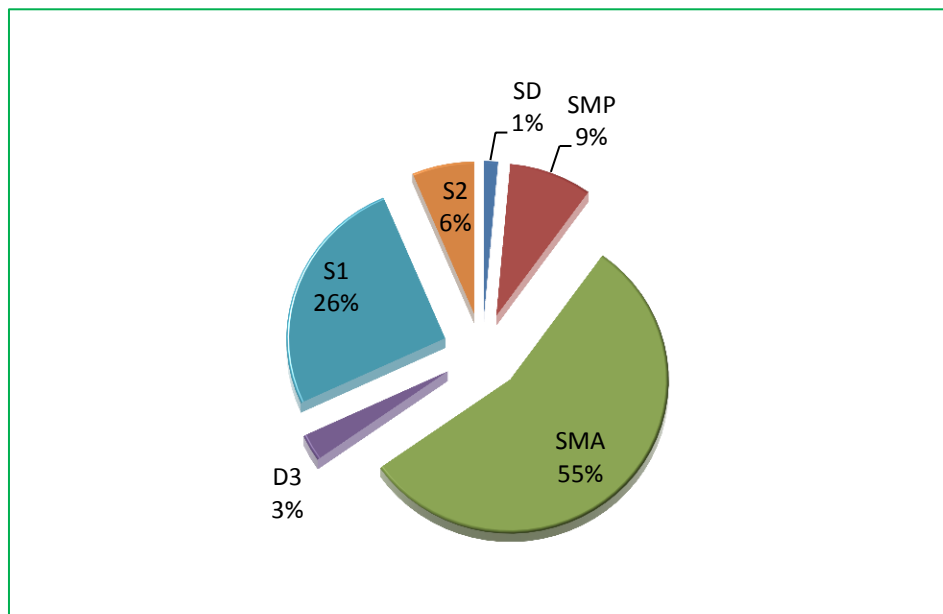
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa komposisi jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada Dinas Pariwisata sudah proporsional meskipun sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (69,50%). Dalam hal pendistribusian pegawai ke bidang-bidang perlu ditelaah kembali kebutuhan pegawai di masing-masing bidang berdasarkan jenis kelamin.

Dimana dapat dilihat perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata komposisi pegawai laki-laki dan perempuannya berbanding 9 : 1, demikian halnya dengan bidang pemasaran pariwisata, bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sekretariat lebih besar jumlah laki-laki dari pada perempuan kecuali pada Bidang Pembinaan Industri Pariwisata komposisi pegawai perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Hal ini harus disikapi dengan menelaah kembali kebutuhan pegawai pada masing-masing bidang berdasarkan jenis kelamin.

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Urusan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretariat	1	1	16	1	11	2	32
2.	Pemasaran Pariwisata	0	2	14	0	8	1	25
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	9	30	1	7	2	50
4.	Pembinaan Industri Pariwisata	0	0	10	2	4	3	19
5.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	8	0	6	1	15
Total		2	12	78	4	36	9	141
Presentase		1,42	8,51	55,32	2,84	25,53	6,38	100,00



Grafik 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

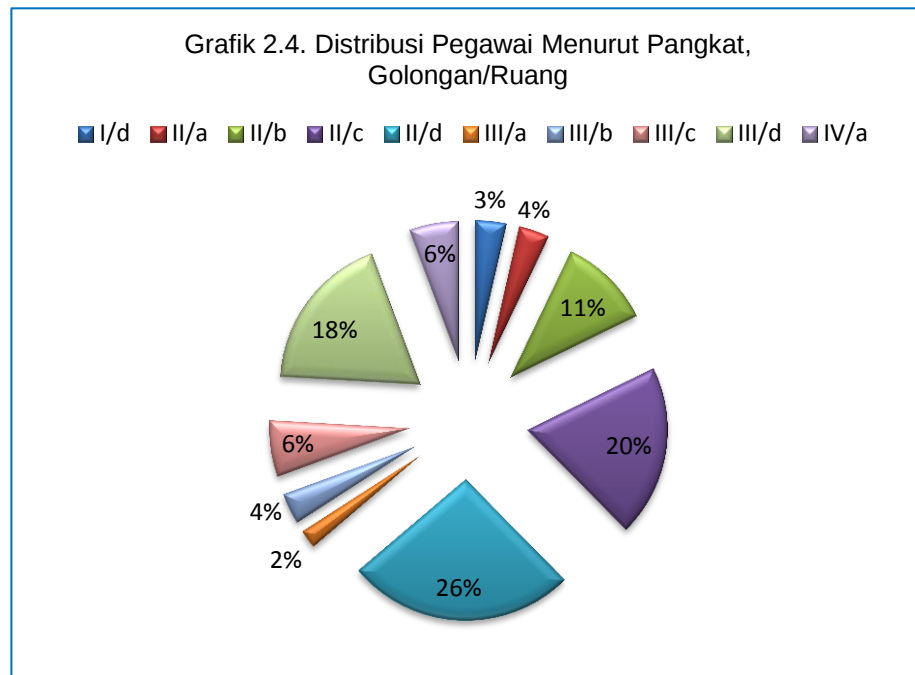
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan SMA sebanyak 78 Orang atau 55,32% dan diikuti dengan yang berpendidikan S1 sebanyak 36 orang atau 25,53%. Sedangkan pegawai yang memiliki pendidikan S-2 berjumlah 9 orang atau 6,38%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah

pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat pendidikan dibawah S1 atau 68,08%. Kondisi kepegawaian Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara sudah cukup baik, jika ditinjau dari sisi jenjang pendidikan formal. Meski demikian, hal ini masih dirasa perlu untuk meningkatkan wawasan karyawan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, karena latar belakang pendidikan dibidang pariwisata masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Sedangkan berdasark analisis beban kerja jika dibandingkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan peningkatan kompetensinya. Dikemudian hari diharapkan lebih banyak lagi pegawai Dinas Pariwisata yang meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3. Distribusi Pegawai Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Urusan	GolonganRuang										Jumlah
		I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	
1.	Sekretariat	1	1	1	5	10	1	0	3	9	1	32
2.	Pemasaran Pariwisata	0	0	3	3	10	0	2	2	3	2	25
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	4	4	9	11	11	1	1	1	7	1	50
4.	Pembinaan Industri Pariwisata	0	0	0	4	5	1	2	3	2	2	19
5.	Pengembangan EkonomiKreatif	0	0	2	5	1	0	0	0	5	2	15
Total		5	5	15	28	37	3	5	9	26	8	141
Presentase		3,55	3,55	10,6 4	19,8 6	26,2 4	2,13	3,55	6,38	18,4 4	5,67	100



Dari tabel 1.3 di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan yaitu dengan golongan ruang II/d sebanyak 37 orang atau 26,24%, selanjutnya golongan ruang II/c sebanyak 28 orang atau 19,86% kemudian disusul oleh golongan ruang III/d sebanyak 26 orang atau 18,44%, sedangkan komposisi terendah adalah golongan ruang III/a sebanyak 3 orang (2,13%), selanjutnya golongan ruang I/d, II/a dan III/b masing-masing sebanyak 5 orang atau 3,55 %.

Adapun permasalahan sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum yaitu :

- Jumlah pegawai dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing;
- Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan;

- c. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan.

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara berupa bangunan, peralatan dan mesin, tanah serta aset tetap lainnya baik yang ada di dinas dan unit dinas sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata
Kab. Kutai Kartanegara (Keadaan per 31 Desember 2019)

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	JUMLAH	HARGA (Rp.)
1.	TANAH	7	476.482.065.644,00
2.	ALAT-ALAT BESAR	17	6.544.724.180,00
3.	ALAT-ALAT ANGKUTAN	88	5.782.791.950,00
4.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	215	2.466.077.000,00
5.	ALAT PERTANIAN	87	54.035.000,00
6.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.877	5.715.756.495,55
7.	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	467	21.631.048.700,00
8.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	1	37.500,00
9.	ALAT LABORATORIUM	1.121	1.112.544.696,00
10.	BANGUNAN GEDUNG	240	99.308.513.967,04
11.	MONUMEN	11	13.968.089.164,00
12.	JALAN DAN JEMBATAN	8	3.126.376.679,70
13.	BANGUNAN AIR/IRIGASI	2	200.108.333.334,00
14.	INSTALASI	3	216.829.000,00
15.	JARINGAN	3	616.560.200,00
16.	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	7	379.477.441,00
17.	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	121	685.238.070,00
18.	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	3.402	463.700.088,00
19.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2	5.026.082.119,00
Jumlah		8.679	843.688.281.228,29

PERMASALAHAN :

- a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran layak, hanya saja masih perlu peningkatan terutama fasilitas umum seperti saluran air bersih

masih sering macet dan batas waktu pengoperasionalan ac sehingga sangat mengganggu kenyamanan pegawai dalam bekerja.

- b. Kurang memadainya ketersediaan mobilitas operasional kerja terutama kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sudah berusia tua.
- c. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.2.3. SUMBER ANGGARAN

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara didukung anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun APBN. Berikut ini perkembangan anggaran dari tahun 2017-2021 baik APBD maupun APBN.

Tabel 2.5 (TC.24.I.) Perkembangan Dana APBD (Murni)
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN ANGGARAN				
		2017	2018	2019	2020	2021 (Murni)
1.	Belanja Tidak Langsung	15.181.811.185,00	13.228.645.703,31	12.906.788.899,00	14.373.857.219,31	27,085,400,883,00
2.	Belanja Langsung	11.184.556.299,91	10.571.195.571,00	20.791.070.699,00	31.141.307.137,12	
TOTAL		26.366.367.484,91	23.799.841.274,31	33.697.859.598,00	45.515.164.356,43	27,085,400,883,00

Tabel 2.6 (TC.24.II.) Perkembangan Dana APBN (DAK)
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisata/ Pembangunan Plaza Pusat Jajanan / Kuliner (DAK)	-	0	2.585.533.000,00		0
2.	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisata/ Pembangunan Kios Cinderamata		0		1.603.458.000,00	0
3.	Program Pembinaan Industri Pariwisata/Fasilitas Pelatihan Pemandu Wisata		0		785.004.000,00	0
TOTAL		0	0	2.585.535.019,00	2.388.462.000,00	0

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal tidak termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pasal 3 sehingga Dinas Pariwisata tidak melakukan penyusunan SPM. Dinas pariwisata merupakan kategori urusan pilihan dalam melayani masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (hal ini disesuaikan kemampuan APBD) setidaknya dari tahun 2016-2021

besaran belanja langsung memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung (belanja pegawai).

Diharapkan tahun-tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program/ kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah tertera dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021) diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakeholders pariwisata maupun masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan baik dan lancar.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha untuk mengimplementasikan program/kegiatan dari tahun ketahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan juga sebagai kepedulian terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama calon wisatawan maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 4 program strategis yaitu :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pembinaan Industri Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan keempat program tersebut melalui berbagai Program/kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan pihak terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (RIPPARKAB) Tahun 2016-2025. Dari data yang diperoleh dan setelah melalui perhitungan bahwa untuk indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari tahun 2016 - 2020 mengalami pasang surut. Sedangkan indikator kinerja yang tidak pernah tercapai adalah indikator Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Long of Stay) karena tidak tersedia data sebagai dasar perhitungan.

Tabel 2.7 Review Target , Realisasi dan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018 (sebelum Review Renstra)

No.	Indikator kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	19 % (1.904.029)	1.795.245 orang	94,29 %	1.961.150 orang	1.720.217 orang	87,71 %
2.	Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata	9 data dan informasi	10 data dan informasi	111 %	11 data dan informasi	11 data dan informasi	100 %
3.	Jumlah analisis pasar pariwisata	4 dokumen	2 dokumen	50 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
4.	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya	156 Kali	90 kali	57,69 %	171 kali	150 kali	87,72 %
5.	Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek	8 Kali	8 kali	100 %	10 kali	8 kali	80 %
6.	Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif	2 kerjasama 4 kegiatan	4 kerjasama 7kegiatan	200 %	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
7.	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	20 DTW	12 DTW	60 %	13 DTW	13 DTW	100 %
8.	Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	3 %	Rp.3.489.486.553	129,24 %	Rp.3.703.321.050	Rp.2.977.117.800	80,39 %
9.	Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	50 UJP	4 UJP	8 %	50 UJP	35 UJP	80 %
10.	Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata	35 USP	67 USP	191,43 %	35 USP	30 USP	85,71 %
11.	Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industry pariwisata	5 KLP	4 Kali	80 %	5 KLP	5 KLP	100 %
12.	Jumlah Mitra Kelompok	7 Kelompok	16 Kelompok	133,33 %	20 KLP	20 KLP	100 %

Tabel 2.8 Review Target , Realisasi dan Capaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020 (Setelah Reviu Renstra)

No.	SasaranStrategis	Indikatorkinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75	63,40	84,53 %	75	68,88	91,84 %
2.	Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.019.984	1.600.866	79,25 %	2.201.783	693.246	31,49 %
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Long Of Stay)	Hari	3	1	33,33%	4	1	25,00%
3.	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah	113	198	175,22 %	120	69	57,50 %

2.4. REVIEW PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 – 2020

Visi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2020 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”**, yang diimplementasikan dalam program prioritas yang telah tersusun dalam misi IV Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **“Meningkatkan pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah”**.

Selanjutnya misi tersebut menjadi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 sektor kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- Tujuan** : Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur.
- Sasaran** : Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara
- Indikator** : Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Pariwisata dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Periode 2016-2020

Visi	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan				
Misi	1. Meningkatkan pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah 2. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat				
RPJMD			RENSTRA DINAS PARIWISATA		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatkan daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan
				Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Kreatif	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Long Of Stay)
					Jumlah Aktivitas ekonomi kreatif
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pariwisata yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Telaahan pencapaian Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara yang diwujudkan dalam capaian kinerja sasaran oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020 :

- 1) Bahwa dalam pencapaian destinasi pariwisata yang berdaya saing telah diwujudkan dalam pengembangan destinasi.
- 2) Pengembangan dan pembinaan terhadap usaha industri pariwisata, peningkatan kualitas SDM, serta promosi telah dilakukan selama kurun Renstra 2016-2020 namun belum signifikan untuk mencapai tujuan sebagai destinasi yang berdaya saing, sehingga perlu strategi dan dukungan yang lebih agresif, beragam serta fokus pada perubahan pola minat kunjungan wisatawan milenial saat ini.
- 3) Konektifitas antar pemangku kepentingan pariwisata (Pemerintah daerah, pelaku jasa industri pariwisata, masyarakat pariwisata, akademisi, perhimpunan-perhimpunan/komunitas kepariwisataan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah media) perlu peningkatan dan pengembangan lebih lanjut.

2.5. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisata.

2.5.1. Peluang

- 1) Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara berupa alam, budaya maupun buatan yang khas dan mempunyai daya saing dengan daerah lain.
- 2) Situasi politik, keamanan dan kenyamanan Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya sangat kondusif.
- 3) Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau suatu daerah.

- 4) Tingkat kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara akan wisata semakin meningkat.
- 5) Semakin berkembangnya industri pariwisata dunia yang dapat mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- 6) Semakin tumbuh dan perkembangnya teknologi informasi sebagai sarana penunjang kepariwisataan;
- 7) Beragamnya produk-produk pendukung kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikembangkan oleh masyarakat .

2.5.2. Tantangan

- 1) Semakin pesatnya pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kompetitor baik dalam wilayah Kalimantan Timur maupun diluar Kalimantan Timur.
- 2) Masih rendahnya kualitas pengelolaan potensi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan.
- 3) Peranan seni budaya khas Kutai Kartanegara sebagai Daya Tarik Wisata belum dimaksimalkan baik dari jumlah maupun kualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Permasalahan pembangunan pada sektor pariwisata pada umumnya berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan potensi ekonomi kreatif yang bersumber dari seni budaya daerah.

Dalam perkembangannya belum banyak destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki daya saing. Salah satu penyebabnya adalah karena belum terhubungnya akses ke destinasi wisata yang terintegrasi secara baik, mudah dijangkau dan murah. Dalam mengembangkan suatu destinasi agar siap jual perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya Attraction (Atraksi/Daya Tarik), Accesability (Aksesibilitas), Amenities(Amenitas/ Fasilitas), dan Ancillary (Kelembagaan). Aspek-aspek ini harus terpenuhi guna terwujudnya destinasi wisata yang berkembang dan siap jual.

Imbas dari belum berkembangnya destinasi pariwisata di Kutai Kartanegara yaitu belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bersumber dari Laporan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021), PDRB Kutai Kartanegara 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Pertambangan dan Penggalan menempati urutan pertama sebesar 89.150,21 atau 59,81 % disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22.238,24 atau 14,92 %, dan Konstruksi 12.761,13 atau 8,56 %. Sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai representasi perkembangan sektor pariwisata hanya 527,18 atau 0,35

% dari Total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 149.057,82 . Namun catatan ini masih belum mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap struktur APBD secara utuh, karena variabel yang dicatat hanya berdasarkan penyediaan akomodasi dan makan minum sedangkan variabel untuk bidang pariwisata sangat kompleks, seperti biaya konsumsi yang dikeluarkan wisatawan, sektor pertanian perkebunan dan kelautan yang men-support pariwisata, kedai makanan atau warung yang berada disekitar wisatawan sebagai dampak dari aktifitas pariwisata belum terhitung secara data. Kesimpulannya potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih optimis lebih dari catatan yang disampaikan.

Sebagai akibat dari masih kecilnya sumbangan sektor pariwisata terhadap Struktur pembentukan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masih rendahnya kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) ke Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi wisatawan.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara dari data BPS Kutai Kartanegara Tahun 2020 sejumlah 436 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 632.110 orang. Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan asing di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai pada tahun 2020 belum dapat diperhitungkan karena terbatasnya data pendukung untuk dilakukan perhitungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan destinasi wisata strategis Kabupaten Kutai Kartanegara belum siap jual, bisa diartikan belum fokus terhadap salah satu untuk meningkatkan nilai daya saingnya

menjadi salah satu destinasi wisata yang utuh dan siap didatangi wisatawan.

- 2) Belum maksimalnya strategi pemasaran pariwisata. Promosi merupakan langkah pengenalan untuk mengangkat nilai sebuah produk agar dikenal dan laku, tentu langkah ini butuh banyak energi dan biaya agar tepat sasaran dan efektif efisien. Dunia digital belum diperankan secara maksimal sampai dengan saat ini. Tentunya diperlukan upaya yang sangat baik agar semua berjalan lancar dan bermanfaat banyak terhadap promosi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata. Masyarakat perlu ditingkatkan kualitas sadar wisatanya, peran pembangunannya dalam pembentukan lembaga-lembaga pariwisata seperti Asosiasi, Kelompok sadar wisata dan lain-lain.
- 4) Belum maksimalnya pengembangan pengelolaan karya seni budaya yang kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata. Atraksi yang kreatif merupakan syarat untuk berhasilnya mengembangkan potensi yang berbasis cipta karya manusia yang akan bersinergi dengan potensi alam yang sudah ada.
- 5) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata. Banyaknya implementasi ketatapemerintahan yang perlu diikuti dan dikerjakan untuk menjadi penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai akar permasalahan seperti berikut :

a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata :

- 1) Pembangunan infrastruktur sarana prasarana pariwisata belum fokus sehingga tidak mudah dijangkau dan mahal.

Akar masalah ini dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti :

- Aspek Aksesibilitas :

Akses darat ke objek wisata masih sulit yang berdampak langsung pada waktu tempuh dan pengeluaran yang tinggi bagi perjalanan wisatawan. Transportasi umum belum terintegrasi baik. Akses pendukung ke destinasi unggulan belum bagus. Jarak tempuh dari Pintu masuk ke destinasi jauh dan lama demikian juga dengan akses air menuju destinasi unggulan antar Kecamatan belum terkoneksi baik.

➤ Aspek Amenitas :

Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh. Belum dibangun maksimal ketersediaan sarana prasarana pendukung kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar jalan lingkungan, jaringan air bersih dan listrik, juga permasalahan kebutuhan dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah dan sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan sebagainya. Sarana prasarana yang sudah ada belum lengkap dan tidak terawat dengan baik bahkan banyak dokumen perencanaan pembangunan fasilitas wisata yang belum terealisasi pembangunan fisiknya.

➤ Aspek Atraksi :

Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan. Pariwisata pedesaan sebagai minat utama wisatawan saat ini belum dikembangkan secara maksimal. Strategi pengembangan wisatawan pedesaan sebagai upaya pemerataan ekonomi masyarakat yang langsung dapat berimplikasi terhadap ekonomi

masyarakat. Potensi pariwisata yang berbasis budaya belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal.

2) Lemahnya koordinasi lintas sektor

Hal ini adalah komitmen penyelenggara pemerintah daerah untuk bersinergi membangun pariwisata berkomitmen dengan dukungan lintas sektor, secara bersama dan kompak.

b. Bidang Pemasaran Pariwisata:

1) Belum adanya identifikasi pasar wisata;

Belum adanya analisa pasar yang tajam untuk tiap destinasi pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara menyebabkan kegiatan pemasaran yang selama ini dijalankan bersifat global. Seharusnya sebuah destinasi mempunyai analisa pasar yang jelas, agar pemasaran yang dilakukan lebih maksimal dan tujuan mengundang banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

2) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi;

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, harusnya diikuti pula dengan percepatan informasi. Data dan informasi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara perlu disusun agar menjadi lebih informatif. Belum adanya data akurat tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang selama ini diperoleh dari laporan setiap destinasi wisata ataupun dari setiap kecamatan, belum banyaknya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan data dan informasi serta belum dilakukannya proses input data yang terintegrasi langsung antara sumber data yang ada di

destinasi wisata/mitra pariwisata dengan pusat data Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

- 3) Strategi promosi pariwisata kurang variatif, kreatif dan inovatif yang belum berorientasi pada target sasaran pasar.

Tantangan atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat semakin menuntut agar promosi pariwisata dilakukan dengan lebih variatif, kreatif dan inovatif. Strategi promosi pariwisata konvensional hendaknya dikemas menjadi lebih menarik, seperti event-event pameran dibuat semenarik dan se informatif mungkin agar dapat diterima oleh para calon wisatawan. Demikian halnya dengan jenis promosi yang dilakukan juga dibuat lebih beragam sesuai dengan target pasar. Promosi yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah promosi yang efektif melalui digital marketing seperti internet dan media sosial. Beberapa tahun terakhir promosi yang telah dilaksanakan adalah dengan mengikuti pameran-pameran, leaflet dan booklet, dan promosi media sosial. Namun promosi melalui media sosial saat ini masih belum maksimal dari segi konten dan kreatifitas, sehingga menjadi sangat penting untuk dilakukan upaya penguatan sumber daya manusia khususnya bidang pemasaran agar mampu dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun penguasaan bahasa asing.

c. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata :

- 1) Masih sedikit jumlah industri dan sumber daya manusia pariwisata yang tersertifikasi;

Kualitas sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan kualitas pelayanan pada industri pariwisata. Saat ini kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya bisa dikatakan belum memadai. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan sertifikasi standarisasi kualitas sumber daya manusia maupun kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitasi pemerintah daerah dalam sertifikasi profesi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, namun terbatas pada jenis profesi pramuwisata, selain itu jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi jumlahnya sangat kecil per kegiatan. Padahal tiap profesi sudah seharusnya ter-sertifikasi agar profesionalisme sumber daya manusia Pariwisata lebih baik. Sedikitnya ada 6 bidang dan 32 sub bidang yang wajib disertifikasi. Mulai dari front office, housekeeping, food production, food and beverages, biro perjalanan, hingga tour operator.

Selain itu, belum optimalnya kemitraan dengan dunia pendidikan yang ada di Kalimantan Timur sebagai lembaga profesional yang mencetak sumber daya manusia pariwisata dengan stakeholder pariwisata Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pengguna jasa sumber daya manusia tersebut juga turut menjadi faktor belum maksimalnya pengelolaan sumber daya manusia pariwisata. Selanjutnya adalah masih rendahnya hubungan kemitraan atau kerjasama pengembangan sumber daya manusia dengan kelembagaan kepariwisataan yang ada di dalam ataupun di luar Kutai Kartanegara.

- 2) Belum maksimalnya pembinaan dan pengendalian terhadap industri pariwisata;

Pembinaan dan pengendalian terhadap sektor usaha sarana pariwisata juga belum maksimal karena selama ini

yang telah dilakukan masih terbatas pada sektor hotel, biro perjalanan wisata dan restoran. Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1990 terdapat 13 sektor usaha pariwisata seperti 1.) daya tarik wisata; 2.) kawasan pariwisata; 3.) jasa transportasi wisata; 4.) jasa perjalanan wisata; 5.) jasa makanan dan minuman; 6.) penyediaan akomodasi; 7.) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 8.) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran; 9.) jasa informasi pariwisata; 10.) jasa konsultan pariwisata; 11.) jasa pramu wisata; 12.) wisata tirta; dan 13.) spa. Pembinaan dan pengendalian yang sudah dilakukan juga bersifat sampling, karena terbatasnya dana dan personil.

- 3) Masyarakat sekitar destinasi wisata belum sepenuhnya sadar wisata;

Kegiatan pembinaan masyarakat sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, namun kurangnya follow-up menyebabkan pembinaan hanya bersifat sementara dan pada akhirnya manfaatnya kurang maksimal terhadap aktifitas kepariwisataan. Saat ini, tercatat 10 kelompok sadar wisata yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Sumber : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata DISPAR Kukar).

d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- 1) Kurangnya peningkatan kualitas potensi Ekonomi kreatif;

Dari 16 sub sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada beberapa tahun terakhir baru dikembangkan secara sederhana yaitu potensi seni pertunjukan, kriya, fashion dan kuliner. Hal ini tentunya butuh perhatian yang serius terhadap upaya pengembangan yang berdaya saing dengan ekonomi kreatif di daerah lain.

- 2) Kurangnya sarana ruang untuk menampilkan potensi ekonomi kreatif;

Sarana ruang kreatif menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hasil karya ciptaan kreatifitas mendapat tempat untuk mempublikasikan kepada masyarakat dan calon peminat agar dapat terus berkarya, selain itu dapat mengetahui keinginan pasar terhadap hasil karya kreatif yang ada.

- 3) Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf;

Kutai Kartanegara dengan berbagai kekhasan daerah menjadi bekal utama untuk dapat bersaing di daerah lain seperti kehidupan masyarakat, flora fauna, kuliner, kain dan lain-lain.

e. Permasalahan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pariwisata (Sekretariat) :

- 1) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan monitoring evaluasi kegiatan.
- 2) Belum maksimalnya penyelenggaraan administrasi keuangan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3) Belum maksimalnya pelayanan barang dan fasilitas umum penyelenggaraan perkantoran.

Rumusan permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
(Eselon II)	(Eselon III)	(Eselon IV)
Trend Kunjungan Wisatawan menurun	Kurangnya Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan event/ festival
		Kurangnya hari pelaksanaan festival
		konten dan rangkaian kegiatan yang belum berstandar
		Daya dukung amenitas dan aksesibilitas belum optimal disekitar event/festival
		Masih banyaknya event/ festival yang belum memenuhi standar
		Kurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada kemampuan untuk melakukan kunjungan wisata
	Kurangnya Kualitas Daya Tarik destinasi wisata	Penyebaran fasilitas penunjang (konsumsi, akomodasi) belum merata di DTW dan desa wisata
		Kurangnya Data Aksestabilitas, Amenitas dan Atraksi (3A) Prioritas DTW
		Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana DTW yang dikelola pemerintah dan masyarakat (hibah)
		Masih kurang aktifnya POKDARWIS dalam mensosialisasikan dan menerapkan Sapta Pesona
		Jumlah POKDARWIS tidak sebanding dengan potensi wisata yang ada

		Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata
	Masih kurangnya investasi sektor pariwisata	Kurangnya kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola destinasi pariwisata
	Belum optimalnya pemasaran pariwisata	Masih kurangnya promosi pariwisata diberbagai media promosi (offline dan Online)
		Masih kurangnya penyediaan data informasi pariwisata
		Masih Kurangnya kerjasama kemitraan Pariwisata
		Kurang terfasilitasinya promosi yang dilakukan pelaku pariwisata (Industri Pariwisata, Asosiasi, Komunitas, Sanggar seni dan Paguyuban)
Masih kurangnya event kreatif	Kurangnya pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Masih kurangnya ruang kreasi bagi pelaku kreatif
		Kurangnya produk Kreatif khas daerah
		Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak cipta
		Kurang terfasilitasinya pelaku dan produk kreatif daerah dalam event kreatif
	Kurangnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masih banyak Tenaga Kerja bidang pariwisata yang belum bersertifikasi kompetensi
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
		Belum adanya sekolah vokasi pariwisata
		Kurangnya jumlah SDM pariwisata
		Kurangnya minat generasi muda pada sektor pariwisata
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aktifitas kepariwisataan

		Ekosistem ekonomi kreatif "ABCGM" (academition, busines, community, government, Media) belum optimal.
--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 5 tahun kedepan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia secara berkelanjutan.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditempuh melalui pembangunan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera;** Kondisi masyarakat Kukar yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.
- 2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berbahagia;** Kondisi masyarakat Kukar yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Terpilih 2021 – 2026 pada bidang Pariwisata pada misi 3 Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dirumuskan dalam program dedikasi sebagai berikut :

"Kutai Kartanegara Kaya Festival [K3F] dan Kukar Kreatif IDAMAN"

Penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Terpilih 2021 – 2026 dirumuskan menjadi sebagai berikut :

1. Mendorong industri pariwisata menggeliat di bumi Kutai Kartanegara, dengan mengusung konsep pertunjukan sebagai roh pariwisata Kukar.
2. Penyediaan destinasi wisata yang memadai, mengkolaborasikan seni, budaya dan potensi ekonomi wilayah, dengan melakukan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan 100 festival seni dan budaya skala kabupaten/kecamatan.
4. Memfasilitasi pelaku industri pariwisata dan mendorong tumbuhnya pusat kuliner sebagai daya tarik wisata Kutai Kartanegara.

Deskripsi Program Kukar Kreatif IDAMAN :

1. Menyediakan ruang kreatif bagi muda-mudi millenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif
2. Menetapkan dan memfasilitasi pekan kreatif daerah minimal per 3 bulan yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif kukar.
3. Dalam pekan kreatif memprioritas pada komoditi kerajinan, video, film, musik dan seni pertunjukan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020 – 2024

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur maupun RTRW. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: **“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap

misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden Republik Indonesia nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah **“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”**. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- 1) Nilai devisa pariwisata;
- 2) Kontribusi PDB Pariwisata;
- 3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut :

1. Perspektif stakeholders :

- 1) Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;

2. Perspektif customer :

- 1) Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
- 2) Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
- 3) Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
- 4) Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
- 5) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
- 6) Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Perspektif internal process :

- 1) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
- 2) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif dan
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

4. Perspektif learn and growth :

- 1) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf :

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif

yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing.

Strategi :

- a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.
- b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan
- c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;

2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership),

Strategi :

- a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial,
- b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif,
- c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan
- d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,

Strategi:

- a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif),
- b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan

- c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing,
Strategi:
 - a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif,
 - b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan
 - c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan,
Strategi:
 - a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan
 - b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
- 6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas,
Strategi:
 - a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing,
 - b) Adopsiteknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan
 - c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
- 7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional,

Strategi :

Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Hasil telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia :

- a. Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah.
- b. Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara; secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025. Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk kegiatan yang berskala internasional, nasional maupun lokal, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- c. Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di mana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional			
1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Kapasitas dan jenis layanan dalam sertifikasi SDM yang masih kurang memadai	Akses udara, darat dan air ke Destinasi wisata prioritas dari pintu masuk utama Kalimantan Timur belum tersambung baik, terutama akses udara dan darat, sehingga berpengaruh pada cost dan waktu.	Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara berupa alam, budaya maupun buatan yang khas dan mempunyai daya saing dengan daerah.
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Belum mantapnya sistem manajemen pengembangan SDM pariwisata	Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai	Situasi politik, keamanan dan kenyamanan Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya sangat kondusif.
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Belum optimalnya kerjasama dengan industri dalam jasa pariwisata yang ada	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata;	Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau suatu daerah.

4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Belum optimalnya layanan pelatihan Usaha Jasa Pariwisata yang secara efektif	Tingkat persaingan dengan negara /daerah lain sangat tinggi;	Tingkat kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara akan wisata semakin meningkat.
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Belum terwujudnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang kredibel	Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal	Semakin berkembangnya industri pariwisata dunia yang dapat mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Masih lemahnya sistem pengawasan pariwisata	Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi komunitas masyarakat	Semakin tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi sebagai sarana penunjang kepariwisataan;
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Masih perlunya diperbaharui berbagai sistem pemasaran pariwisata yang belum modern dan sesuai tuntutan zaman	Semakin pesatnya pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kompetitor baik dalam wilayah Kalimantan Timur maupun diluar Kalimantan Timur.	Beragamnya produk-produk pendukung kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikembangkan oleh masyarakat
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian		Masih rendahnya kualitas pengelolaan potensi Daya Tarik Wisata yang di Kabupaten Kutai Kartanegara baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan.	

9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif dan		Peranan seni budaya khas Kutai Kartanegara sebagai Daya Tarik Wisata belum dimaksimalkan baik dari jumlah maupun kualitas.	
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif			
11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional			

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Misi ke-2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Tujuan : Memperbaiki konektifitas antar destinasi dan menyiapkan destinasi yang berdaya saing

Indikator Tujuan : Jumlah destinasi berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sarpras destinasi wisata di kawasan strategis pariwisata;
2. Meningkatnya kualitas Pemasaran destinasi strategis pariwisata;
3. Meningkatnya kualitas industri dan SDM Masyarakat Pariwisata di kawasan strategis pariwisata;
4. Meningkatnya kualitas potensi ekraf di kawasan strategis pariwisata;
5. Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan pelayanan perkantoran;

Indikator Sasaran Strategis :

- 1) Kontribusi sub sektor Pariwisata terhadap PDRB Kalimantan Timur
- 2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Hasil Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dengan mencermati Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan perwujudan dari generalisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara (RIPPARKAB) tahun 2016-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2025 sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar sudah mencerminkan keterpaduan dan keselarasan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya saja bahwa ada hal-hal sebagian kewenangan dan urusan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat Provinsi yang berbeda skala prioritasnya akan tetapi semua tidak bertolak belakang dan berorientasi untuk mewujudkan visi besar kepariwisataan yaitu menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata Berdaya Saing dan Penyumbang PAD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan

pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut terdiri atas Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Rencana Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan lain-lain

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini sebagai acuan dalam memberikan izin pemanfaatan ruang untuk segala bentuk kegiatan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karenanya, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017).

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memerhatikan KLHS. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi.

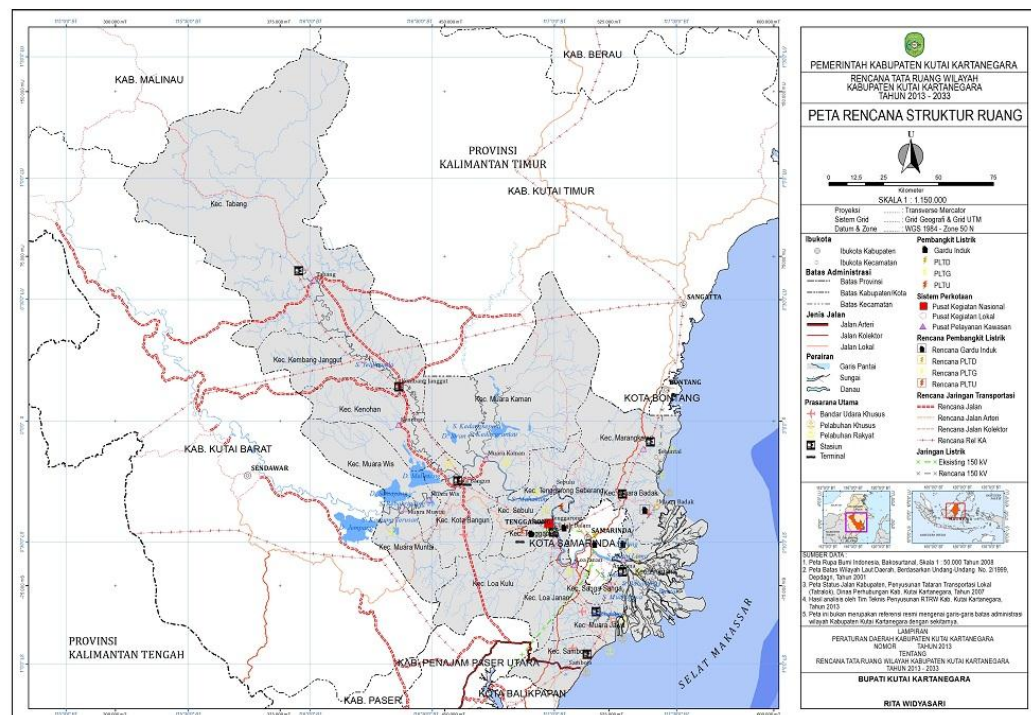
Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah.

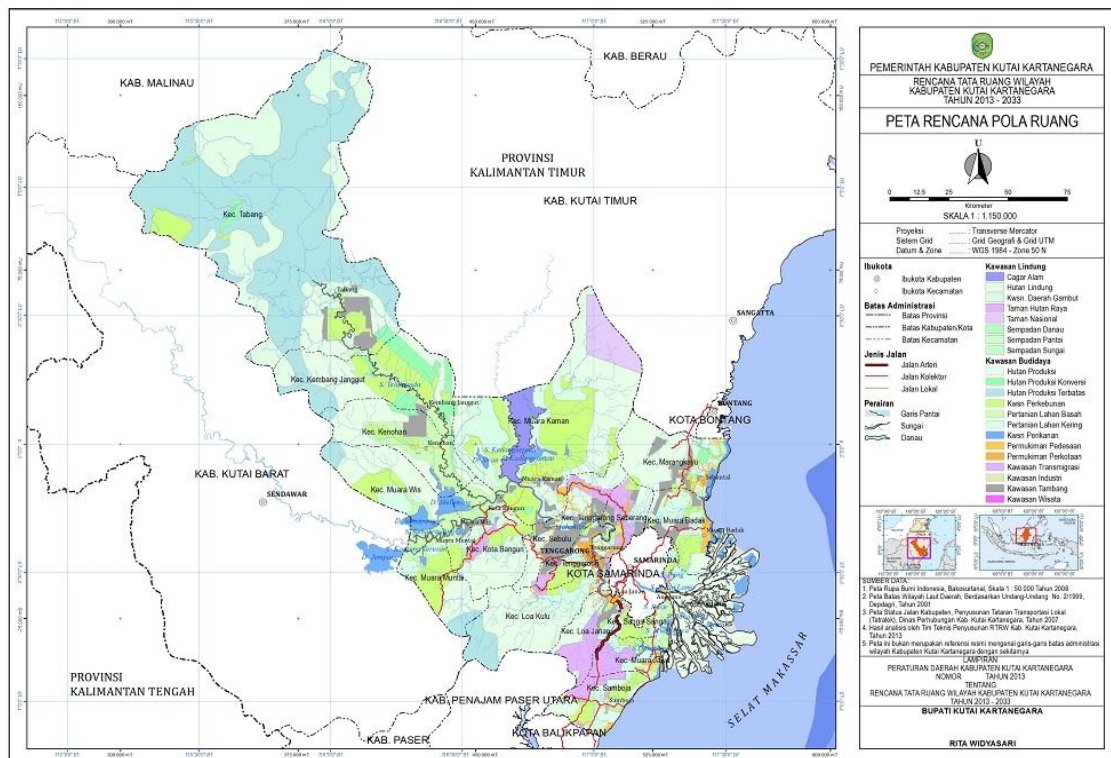
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penelaahan RTRW dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2025 merupakan analisis spasial untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan urusan pariwisata beserta arah lokasi pengembangannya.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (RIPPARKAB) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Struktur Ruang Wilayah)



Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
(Pola Ruang Wilayah)



Berdasarkan telaahan Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia , Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur serta dengan memperhatikan Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dapat dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

VISI (RPJMD)	:	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegarayang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI (RPJMD)*	:	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	:	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa	Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata daerah (hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, souvenir dan homestay)
			Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah	Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang berbeda dengan Tema dan konten tertentu serta memfasilitasi penyelenggaraan event dengan melibatkan insan komunitas kreatif yang bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, dengan cara mengkurasi konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa point sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Dampak wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor pariwisata;
- b. Penetapan Sebagian wilayah Kutai Kartanegara menjadi lokasi Ibu Kota Negara;
- c. Digitalisasi promosi pariwisata, yang efektif dan berkesinambungan;
- d. Pemenuhan destinasi wisata masyarakat millenial, dan digital;
- e. Wadah untuk penampilan produk kreatif;
- f. Peningkatan kelembagaan pariwisata, sertifikasi usaha jasa dan profesi;
- g. Sinergisitas kelembagaan antar Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu organisasiperangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas pembantuan dibidang Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan lingkup tugasnya.

Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2025.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2025 "Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" dan Misi ke-3 nya : "Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai

gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/panduan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya dalam rangka mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara

VISI	TERWUJUDNYA KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA
MISI KE-3	MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TUJUAN RENSTRA DINAS PARIWISATA 2021-2026	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
INDIKATOR TUJUAN	KONTRIBUSI SUB SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SASARAN	1. MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN 2. MENINGKATNYA PAD SEKTOR PARIWISATA DAN EKRAF 3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
INDIKATOR SASARAN	1. PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN 2. KONTRIBUSI PAD SEKTOR PARIWISATA DAN EKRAF 3. PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
INDIKATOR PROGRAM	1. JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA 2. PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF 3. PERSENTASE OKUPANSI 4. PELAKU EKONOMI KREATIF YANG TERFASILITASI 5. PRESENTASI DTW YANG MEMENUHI AKSESIBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata

berdasarkan Visi dan Misi sesuai dokumen RPJMD 2021 – 2025 yaitu : "Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" sehingga kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara baik daya tarik wisata , sumber daya manusia maupun stakeholders beserta kelembagaannya mempunyai kompetensi yang tinggi. Indikator tujuan tersebut adalah jumlah destinasi berdaya saing yang siap dipromosikan untuk menarik kunjungan wisatawan. Memperbaiki konektifitas antar destinasi diartikan sebagai langkah dalam upaya mewujudkan destinasi wisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang siap jual dengan memperbaiki komponen Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitasnya.

Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua stakeholder yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para tour dan travel dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan - perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramu wisata dan lain-lainnya. Para stakeholders ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya.

Destinasi berdaya saing diartikan sebagai strategi pengembangan destinasi yang memiliki nilai banding secara potensi dengan destinasi yang ada di Indonesia, dengan harapan Kabupaten Kutai Kartanegara juga siap bersaing dalam hal potensi destinasi kelas dunia bagian dari Pesona Indonesia.

Tabel 4.2 Daftar 10 Destinasi Wisata Populer
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Nama Destinasi	Lokasi	Potensi Daya tarik
1.	Ladaya	Tenggarong	Wisata Buatan
2.	Pulau Kumala	Tenggarong	Wisata Buatan
3.	Museum Mulawarman	Tenggarong	Wisata Sejarah
4.	Lamin Etam Ambors	Samboja	Wisata Buatan
5.	Makam Raja-raja kutai kartanegara	Tenggarong	Wisata Sejarah
6.	Pantai tanah merah	Samboja	Wisata Alam
7.	Pantai Pemedas	MarangKayu	Wisata Alam
8.	Makam Aji Raja Mahkota dan Habib Tunggang Parangan Anggana	Anggana	Wisata Sejarah
9.	Pantai Pangempang	MarangKayu	Wisata Alam
10.	Pantai Biru Kersik	MarangKayu	Wisata Alam

Tabel 4.3 Daftar 10 Kuliner Populer Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Makanan Khas	Daya Tarik	Ket.
1.	Sate Payau	Daging Yang digunakan adalah Rusa	
2.	Nasi Bekepor	Kaya Akan rempah	
3.	Bobongko	Kue Basah	
4.	Sayur Asam Kutai	Kuah Ikan Gabus	
5.	Rabo Ruan	Suir Ikan Gabus	
6.	Gegicak	Dari Tepung beras putih dan rasanya manis	
7.	Amparan tetak	Mirip Kue Pisang	
8.	Pisang Gapit	Pisang panggang	
9.	Amplang	Cemilan Gurih	
10.	Roti Pisang	Teksturnya empuk	

Beberapa destinasi wisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki daya saing yang siap untuk dikembangkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

1. Desa Wisata Pela Kecamatan Kota Bangun.
2. Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun.

Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas :

Atraksi utama adalah terdapatnya habitat lumba-lumba air tawar yang hanya beberapa di dunia, aktifitas petani nelayan sungai dan landscape perkampungan juga kulinernya. Akses masuk ke desa ini melalui Pusat Kota Provinsi menuju Kecamatan Kota Bangun melalui jalur darat yang sudah terkoneksi baik. Tersedia home stay dan fasilitas penunjang lainnya disekitar desa tersebut. Destinasi lain yang bisa terkoneksi dengan desa Pela adalah desa wisata kedang ipil dengan potensi budaya pedalaman kutai dan kota Tenggarong dan atraksi budayanya Festival Adat Erau juga Museum Mulawarman serta wisata sejarah Muara Kaman.

4.1.2. SASARAN

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Tujuan Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2025 maka ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata di kawasan strategis pariwisata;
2. Meningkatnya kualitas Pemasaran destinasi strategis pariwisata;
3. Meningkatnya kualitas industri dan SDM Masyarakat Pariwisata dikawasan strategis pariwisata;
4. Meningkatnya kualitas potensi ekraf di kawasan strategis pariwisata;
5. Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan pelayanan perkantoran.

Tabel 4.4 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Trend Kunjungan Wisatawan menurun	Masih banyaknya event/ festival yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan event/ festival	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	PAD Sektor Pariwisata	BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Kurangnya hari pelaksanaan festival			Jumlah Kunjungan Wisatawan	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
		konten dan rangkaian kegiatan yang belum memenuhi standar			Persentase Okupansi	
		Daya dukung amenities dan aksesibilitas belum optimal disekitar event/festival				
	Kurangnya Kualitas Daya Tarik wisata	Kurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada kemampuan untuk melakukan kunjungan wisata				
		Penyebaran fasilitas penunjang (konsumsi, akomodasi) belum merata di DTW dan desa wisata				
		Aksesibilitas ke DTW masih sulit dan kurang memadai				

		Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana (amenitas), aksesibilitas menuju ke DTW				
	Masih minimnya investasi sektor pariwisata	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata				
		Belum adanya sekolah vokasi pariwisata				
		Kurangnya jumlah SDM pariwisata				
		Kurangnya minat generasi muda pada sector pariwisata				
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aktifitas kepariwisataan				
		Masih kurang aktifnya POKDARWIS dalam mensosialisasikan dan menerapkan Sapta Pesona				
		Jumlah POKDARWIS tidak sebanding dengan potensi wisata yang ada				
	Belum optimalnya pemasaran pariwisata	Masih kurangnya promosi pariwisata diberbagai media promosi (offline dan Online)				
		Masih kurangnya penyediaan data informasi pariwisata				
	Adanya wabah pandemic Covid 19	Pembatasan kegiatan masyarakat dan kebijakan menutup DTW yang dikelola pemerintah				

Masih kurangnya event kreatif	Kurangnya pemanfaatan dan Fasilitasi HAKI	Masih kurangnya ruang kreasi bagi pelaku kreatif di kecamatan		Meningkatnya Aktifitas EkonomiKreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		Kurangnya produk khas daerah			Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan hak cipta				
		Kurang terfasilitasinya pelaku dan produk kreatif daerah				
	Rendahnya Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum terwadahi pelaksanaan event kreatif				
		Keengganan pelaku menampilkan hasil karyanya				
		Ekosistem ekonomi kreatif "ABCGM" (academition, busines, community, government, Media) belum optimal.				

Maka implementasi pencapaiannya adalah :

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Tabel 4.5 (T-C.25) Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Capaian	Proyeksi	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						K	K	K	K	K	K	K
1	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	625,699,000	669,497,930	729,752,743	1,351,509,840	1,527,206,119	1,756,287,036	1,756,287,036
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	693,246	1,048,509	1,600,866	1,808,979	2,044,146	2,309,885	2,610,170
				Persentase Okupansi	Persen	17,28	20,28	23,28	26,28	29,28	32,28	35,28
			Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif	Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreatif	Kali	69	24	24	24	24	24	24

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten

Kutai Kartanegara khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam pemilihan strategi tersebut menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

Analisis Lingkungan Internal/Analisis lingkungan eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	1. Memiliki potensi alam dan budaya yang khas 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia yaitu berupa kerajaan tertua yang ada di Indonesia 3. Berkembangnya industri pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kutai Kartanegara yang begitu pesat dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 4. Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau suatu daerah. 5. Image atau branding pariwisata Kutai Kartanegara adalah alam dan budaya. 6. Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kutai Kartanegara berupa alam, budaya	1. Akses udara, darat dan air ke Destinasi wisata prioritas dari pintu masuk utama Kaltim belum tersambung baik, terutama akses udara dan darat, sehingga berpengaruh pada cost dan waktu. 2. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai 3. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; 4. Tingkat persaingan dengan negara / daerah lain sangat tinggi; 5. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal 6. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi komunitas

	maupun buatan yang khas dapat berdaya saing yang tinggi dengan luar daerah 7. Kesadaran dan kebutuhan wisata masyarakat Kutai Kartanegara yang meningkat cukup tinggi. 8. Situasi politik, keamanan dan kenyamanan Kutai Kartanegara yang cukup kondusif. 9. Berkembang pesatnya produk-produk pendukung kepariwisataan Kutai Kartanegara yang dibina oleh Dinas lain	masyarakat
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kutai Kartanegara sebagai pesaing 2. Pengelolaan aneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kutai Kartanegara baik alam, budaya maupun buatan sebagai daya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi). 3. Tampilan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata di seluruh destinasi pariwisata Kutai Kartanegara kualitas dan kuantitasnya	1. Pengembangan wisata minat khusus, khususnya yang menawarkan suasana pedesaan dan budaya (paket desa wisata dll) 2. Pengembangan wisata berbasis festival budaya dan tradisi secara rutin 3. Pengembangan wisata pendidikan dan penelitian yang menarik 4. Pengembangan wisata sejarah) 5. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang kepariwisataan beserta manfaatnya	1. Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan di bidang kepariwisataan 2. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas cinderamata dan makanan tradisional 3. Pemfokusan pada pasar wisatawan minat khusus (heritage, culture dan village tourism) 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana transportasi wisata dari dan menuju kawasan wisata di luar wilayah

perlu ditingkatkan. 4. Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat Kutai Kartanegara belum terealisasi maksimal. 5. Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia kepariwisataan Kutai Kartanegara serta penunjangnya kuantitas dan kualitasnya masih kurang. 6. Kredibilitas dan image calon wisatawan/wisatawan luar daerah maupun luar negeri terhadap kepariwisataan Kutai Kartanegara masih cukup tinggi 7. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kutai Kartanegara.		perkotaan 5. Pengembangan fasilitas akomodasi berbasis village tourism 6. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta 7. Pengembangan branding yang sesuai dengan potensi dan persepsi pasar 8. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM Pariwisata mengenai Sadar Wisata dan Sapta Pesona
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W - T
Potensi bencana alam wilayah destinasi daya saing prioritas	1. Pengembangan daya tarik wisata yang mewakili kekhasan 2. Pengembangan pariwisata tanggap bencana 3. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	1. Pengembangan peringatan dini terhadap bencana alam 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang wisata 3. Pengembangan

	kepariwisataan yang tanggap bencana 4. Peningkatan pemeliharaan dan revitalisasi potensi wisata heritage 5. Revitalisasi dan pemeliharaan benda-benda sejarah	kerajinan souvenir khas 4. Pengembangan paket wisata sejarah dan wisata pedesaan 5. Pengembangan pedoman pembangunan sarana pariwisata yang menonjolkan keunikan 6. Pengembangan Branding “Kukar Asia Wonders yang menekankan pada budaya, adat istiadat dan keramahan masyarakat
--	---	--

5.1. STRATEGI

Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 Tahun (2021 – 2026) maka untuk mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata perlu strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa
2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan maka perlu ditetapkan kebijakan umum adalah peningkatan peran budaya sebagai basis pengembangan kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi, penguatan pemasaran, peningkatan

aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui :

1. Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata daerah (hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, souvenir dan homestay).
2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang berbeda dengan Tema dan konten tertentu Serta memfasilitasi penyelenggaraan event dengan melibatkan insan komunitas kreatif yang bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, dengan cara mengkurasi konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan.

Tabel 5.2 (T-C.26) Visi , Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI	TERWUJUDNYA KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA		
MISI 3	MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
TUJUAN	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA		
SASARAN	MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN DAN MENINGKATNYA AKTIFITAS EKONOMI KREATIF		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 2. Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha	1. Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata daerah (hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata,

		dan Pemerintah Desa 2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah	souvenir dan homestay) 2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang berbeda dengan Tema dan konten tertentu Serta memfasilitasi penyelenggaraan event dengan melibatkan insan komunitas kreatif yang bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, dengan cara mengkurasi konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan misi pembangunan “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, untuk meningkatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata maka guna memacu

pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata serta sinergitas antar pelaku wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada programpembangunan daerah dalam RPJMD 2022 - 2025 menurut urusan pemerintahan. Adapun program-program tersebut terangkum dalam program sebagai berikut :

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
2. Program pemasaran pariwisata;
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota

6.2.KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang mendukung kelima program dalam kurun waktu 5 tahun (2022 - 2026) adalah :

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Kawasan Strategis	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

	Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana dalam Pengelolaan KawasanWisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

		Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Investasi Pariwisata
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana KotaKreatif
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Riset
		Pengembangan Pendidikan
		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
		Penyediaan Infrastruktur
		Pengembangan Sistem Pemasaran
		Pemberian Insentif
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		Perlindungan Hasil Kreativitas
		Penyusunan Rencana Aksi

		Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3. INDIKATOR KINERJA

Penetapan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program sektor pariwisata setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program pariwisata periode 2021 – 2026 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja (program dan kegiatan) Dinas Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD Sektor Pariwisata	1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 2. Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Persentase Okupansi 3. Jumlah Aktifitas Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentasi DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota
				Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Event daerah yang terlaksana di dalam negeri
							Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada Event promosi pariwisata di dalam negeri
							Jumlah Event luar negeri yang di ikuti

					Persentase Okupansi		Jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/RuangKreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana ruang kreasi bagi insan kreatif
						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ; jumlah pelaku usaha ekraf, Jumlah sarana prasarana ekraf yang mendapat fasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekraf	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penyediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah

				Kabupaten/kota			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta honorarium penatausahaan keuangan daerah
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan honorarium penatausahaan barang milik daerah
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring kepegawaian dan tim BEKIAS
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis ATK, Bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, dan rapat koordinasi/konsultasi
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tim pengelolaan arsip, jumlah bulan penyediaan jasa telepon, air dan listrik, jumlah bulan penyediaan honorarium THL
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang dipelihara, kendaraan dinas operasional dan peralatan kantor yang dipelihara

6.4. KELOMPOK SASARAN

Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata selama kurun waktu tahun 2021 - 2026, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN USAHA PARIWISATA

Kelompok sasaran Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, adalah :

- a. Pengembangan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
- b. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Wisata;
- c. Penguatan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata;

2. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Kelompok sasaran Pemasaran Pariwisata, adalah :

- a. Pengembangan Promosi Pariwisata;
- b. Penguatan Data dan Informasi Pariwisata;
- c. Penguatan Kerjasama dan Kemitraan Pemasaran Pariwisata;

3. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Kelompok sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif, adalah :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana ekonomi kreatif;
- b. Pengembangan Pengelolaan Karya Seni Budaya dan Kreatifitas Seni Budaya;
- c. Penguatan kerjasama dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif;

4. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kelompok sasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah :

- a. Peningkatan sumber daya manusia profesionalisme pelaku usaha ekonomi kreatif;
- b. Peningkatan sumber daya manusia profesionalisme pelaku usaha pariwisata;
- c. Penguatan kerjasama kemitraan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. SEKRETARIAT

Kelompok sasaran kesekretariatan, adalah:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang perangkat daerah dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. Penguatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penguatan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah;

6.5. PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah jangka menengah. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara namun juga oleh pendanaan yang bersumber dari APBN (DAK), APBD Provinsi Kalimantan Timur (BANKEU) dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pencantuman pendanaan didalam Tabel 6.3 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 6.3 Rencana Pendanaan Indikatif Program APBD
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

NO.	PROGRAM	TAHUN AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN (Rp.)					KONDISI AKHIR
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.935.401.153	19.293.043.795	19.293.043.795	19.293.043.795	19.293.043.795	19.293.043.795	96.465.218.975
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.800.000.000	5.080.000.000	5.080.000.000	5.080.000.000	5.080.000.000	5.080.000.000	25.400.000.000
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.050.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	5.625.000.000
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	225.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.074.999.730	8.920.000.000	8.920.000.000	8.920.000.000	8.920.000.000	8.920.000.000	44.600.000.000

Tabel 6.4 (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Penanggungjawab Program/Kegiatan
						2022		2023		2024		2025		2026		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dan Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100		100		100				
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen		85		85		85		85		85		85		
			Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	Persen		84		84		84		84		84		84		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100		100		100		100		100		84		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,88	70	19.293.043.795,00	72	19.293.043.795,00	73	19.293.043.795,00	74	19.293.043.795,00	75	19.293.043.795,00	75	96.465.218.975,00	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		7	550.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	35	3.350.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		4	350.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	20	2.350.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen		2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	10	250.000.000,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5	750.000.000,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	15.347.327.441,00	12	14.844.991.449,00	12	14.844.991.449,00	12	14.844.991.449,00	12	14.844.991.449,00	60	74.727.293.237,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	14.969.807.441,00	12	14.467.471.449,00	12	14.467.471.449,00	12	14.467.471.449,00	12	14.467.471.449,00	60	72.839.693.237,00	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	377.520.000,00	12	377.520.000,00	12	377.520.000,00	12	377.520.000,00	12	377.520.000,00	60	1.887.600.000,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	60	353.300.000,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	12	70.660.000,00	60	353.300.000,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	10	700.000.000,00	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	250.000.000,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	450.000.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		5	720.039.650,00	5	814.733.000,00	5	814.733.000,00	5	814.733.000,00	5	814.733.000,00	25	3.978.971.650,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan	Paket		1	209.769.650,00	1	269.651.000,00	1	269.651.000,00	1	269.651.000,00	1	269.651.000,00	5	1.288.373.650,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	Paket		1	97.770.000,00	1	97.770.000,00	1	97.770.000,00	1	97.770.000,00	1	97.770.000,00	5	488.850.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak	Paket		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	500.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	200.000.000,00	12	234.812.000,00	12	234.812.000,00	12	234.812.000,00	12	234.812.000,00	60	1.139.248.000,00	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	112.500.000,00	1	112.500.000,00	1	112.500.000,00	1	112.500.000,00	1	112.500.000,00	5	562.500.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	2.179.146.704,00	12	2.611.786.712,00	12	2.611.786.712,00	12	2.611.786.712,00	12	2.274.062.712,00	60	12.288.569.552,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	605.083.992,00	12	1.037.724.000,00	12	1.037.724.000,00	12	1.037.724.000,00	12	700.000.000,00	60	4.418.255.992,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	1.574.062.712,00	12	1.574.062.712,00	12	1.574.062.712,00	12	1.574.062.712,00	12	1.574.062.712,00	60	1.574.062.712,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	325.870.000,00	12	325.870.000,00	12	325.870.000,00	12	325.870.000,00	12	325.870.000,00	60	1.629.350.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	150.200.000,00	12	150.200.000,00	12	150.200.000,00	12	150.200.000,00	12	150.200.000,00	60	751.000.000,00	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	26.120.000,00	12	26.120.000,00	12	26.120.000,00	12	26.120.000,00	12	26.120.000,00	60	130.600.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah yang dibayarkan	Bulan		12	149.550.000,00	12	149.550.000,00	12	149.550.000,00	12	149.550.000,00	12	149.550.000,00	60	747.750.000,00	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59,14	5.080.000.000,00	64	5.080.000.000,00	82	5.080.000.000,00	100	5.080.000.000,00	100	5.080.000.000,00	100	25.400.000.000,00	Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Daya Tarik Wisata		1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	5	2.250.000.000,00	
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan daya tarik wisata	Dokumen		1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	5	2.250.000.000,00	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Kawasan Strategis		4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	20	3.000.000.000,00	
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan strategis pariwisata	Dokumen		4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	20	3.000.000.000,00	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola	Sarana dan Prasarana, Kelompok, Destinasi Pariwisata		16	3.830.000.000	19	3.700.000.000	19	3.950.000.000	19	3.950.000.000	19	3.950.000.000	92	19.380.000.000,00	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola	Sarana dan Prasarana		4	3.225.000.000,00	4	3.225.000.000,00	4	3.225.000.000,00	4	3.225.000.000,00	4	3.225.000.000,00	4	16.125.000.000,00	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberikan pembinaan	Kelompok	20	10	430.000.000,00	10	300.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	10	550.000.000,00	50	2.380.000.000,00	
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan destinasi pariwisata yang berkelanjutan	Destinasi Pariwisata		2	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	22	875.000.000,00	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP	TDUP		10		10		10		10		10		50	1.000.000.000,00	

		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan untuk Pendaftaran TDUP	Usaha Pariwisata		10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	50	500.000.000,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan usaha pariwisata	Kegiatan		5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	25	500.000.000,00	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Okupansi	Persen	20	23,28	1.125.000.000,00	26,28	1.125.000.000,00	29,28	1.125.000.000,00	32,28	1.125.000.000,00	35,28	1.125.000.000,00	35,28	5.625.000.000,00	Bidang Pemasaran Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Pemasaran Pariwisata		13	1.475.000.000,00	13	1.475.000.000,00	13	1.475.000.000,00	13	1.475.000.000,00	13	1.475.000.000,00	65	7.375.000.000,00	
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi	Promosi		4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	20	1.750.000.000,00	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemasaran yang terfasilitasi	Fasilitasi		1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	5	625.000.000,00	
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyediaan data dan penyebaran informasi	Dokumen		4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	20	1.250.000.000,00	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	Kerjasama		4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	20	3.750.000.000,00	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	n/a	4	1.200.000.000,00	4	1.200.000.000,00	5	1.200.000.000,00	6	1.200.000.000,00	7	1.200.000.000,00	7	6.000.000.000,00	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana yang tersedia	Prasarana		3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	15	3.750.000.000,00	

		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Prasarana		3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	15	3.750.000.000,00	
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi,Dokumen		8	350.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	36	1.550.000.000,00	
		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah komunitas/pelaku kreatif yang di fasilitasi	Fasilitasi		2	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	10	1.150.000.000,00	
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Kekayaan intelektual yang terfasilitasi	Fasilitasi		5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	25	250.000.000,00	
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf	Dokumen		1	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000,00	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	8.920.000.000,00	7	8.920.000.000,00	7	8.920.000.000,00	7	8.920.000.000,00	7	8.920.000.000,00	7	44.600.000.000,00	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Orang,Event/Festival, komunitas/pelaku Ekraf		91	8.550.000.000,00	94	8.770.000.000,00	94	8.770.000.000,00	94	8.770.000.000,00	94	8.770.000.000,00	467	43.630.000.000,00	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Orang		20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	100	500.000.000,00	
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah peserta	Orang		20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	100	500.000.000,00	
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah peserta	Orang		20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Event/festival	Event/festival		25	6.920.000.000,00	28	6.920.000.000,00	28	6.920.000.000,00	28	6.920.000.000,00	28	6.920.000.000,00	137	34.380.000.000,00	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi terhadap Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi terhadap komunitas/pelaku Ekraf	komunitas/pelaku Ekraf	2	6	1.400.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.400.000.000,00	6	1.400.000.000,00	30	7.000.000.000,00	
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	Orang	0	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	200	600.000.000,00	
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta	Orang	0	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	40	120.000.000,00	200	600.000.000,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021 - 2026

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara periode 2021– 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mendukung misi ke-3 **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**, Bidang Urusan Pariwisata dalam RPJMD 2021 - 2026 secara detail diuraikan sebagai berikut :

Strategi :

1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa.
2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah.

Arah Kebijakan :

1. Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri pariwisata daerah (hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, souvenir dan homestay) Optimalisasi pemasaran dan kerjasama pariwisata;
2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang berbeda dengan Tema dan konten tertentu Serta memfasilitasi penyelenggaraan event dengan melibatkan insan komunitas kreatif yang bertugas untuk memunculkan ide-ide

kreatif serta konten acara, dengan cara mengkurasi konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan;
2. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Kreatif

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
3. Program pemasaran pariwisata;
4. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
5. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
9. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
10. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
11. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota;

12. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
13. Penyediaan Prasarana (Zonakreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
15. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
16. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
19. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
20. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
21. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
22. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
23. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
24. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota;
25. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata;
26. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
27. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota;
28. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri;
29. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
30. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
31. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan;
32. Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
33. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
34. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
35. Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa);
36. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
37. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif;
38. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
39. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif.

Sehingga dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021– 2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN :								
	INDIKATOR TUJUAN :								
	PAD Sektor Pariwisata	Rp.	669.497.930	729.752.743	1.351.509.840	1.527.206.119	1.756.287.036	1.756.287.036	1.756.287.036
	INDIKATOR SASARAN (IKU DINAS PARIWISATA) :								
	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.048.509	1.600.866	1.808.979	2.044.146	2.309.885	2.610.170	2.610.170
	2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2	2	2	5	5	5	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II.	INDIKATOR PROGRAM :								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,88	70	72	73	74	75	75
	Persentase DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59,14	64	82	100	100	100
	Persentase Okupansi	Persen	20	23,28	26,28	29,28	32,28	35,28	35,28
	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7
	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	Persen	7	7	7	7	7	7	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.	INDIKATOR KEGIATAN :								
	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Perencanaan	3	3	2	0	0	0	8
	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Perencanaan	4	4	4	2	2	0	16
	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola	Sapras	53	3	3	2	2	2	65
	Jumlah TDUP yang ditetapkan	TDUP	8	8	8	8	8	8	40
	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Pemasaran	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah prasarana yang tersedia	Prasarana	2	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan	4	6	7	7	7	7	7
	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Orang	0	115	115	115	115	115	115
	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan	Orang	0	40	90	90	90	90	90

Dari Tabel 7.1 diatas ditetapkan Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2 Program Prioritas Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus/Sumber Data	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Perolehan Nilai Hasil Evaluasi implementasi SAKIP periode sebelumnya	70	72	73	74	75
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW Yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	Jumlah DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Tahun N-1 dibagi dengan Jumlah DTW yang memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Tahun N x 100%	59,14	64	82	100	100
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Okupansi	Persen	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia X 100 %	23,28	26,28	29,28	32,28	35,28
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi Tahun N-1 dibagi dengan Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi N x 100%	4	4	5	6	7
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	Jumlah Pelaku Ekraf Tahun N-1 di bagi dengan Jumlah Pelaku Ekraf Tahun N x 100%	7	7	7	7	7

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (RIPPARKAB), RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2025 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021– 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran tujuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dalam upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kutai

Kartanegara , APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Strategis yang telah disusun ini, diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021– 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pengembangan kepariwisataan yang semakin maju dalam rangka mewujudkan “**Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**”.